

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kewenangan dan Fungsi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya diatur pada pasal 22 D undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam pelaksanaan tugas DPD memiliki tugas, wewenang dan fungsi pada bidang legislasi, bidang pertimbangan dan bidang pengawasan.
2. *Ius Constituendum* Kewenangan dan Fungsi DPD melalui amandemen ke V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara, yaitu, *pertama*, *Rekonstruksi* Jumlah kursi bagi anggota DPD, *Kedua*, Amandemen Pasal 22 D, amandemen pasal 22 D, *Ketiga*, Larangan DPD sebagai Kader Partai Politik.

5.2 SARAN

1. Perlu adanya dukungan dari semua elemen bangsa Indonesia, dukungan dari elit Politik yakni, DPR dan DPD untuk dapat memenuhi persyaratan terhadap usulan amandemen ke V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memenuhi kourum 1/3 dari jumlah anggota MPR.

2. Dukungan dari ahli hukum untuk dapat menuangkan gagasan terhadap pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Dukungan masyarakat, perlu adanya desakan dari masyarakat luas sebagai bentuk aspirasi untuk mendorong Pelaksanaan Amandemen ke V Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
4. Untuk melakukan Amandemen ke V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perlu dibentuk panitia khusus pembentuk Konstitusi Indonesia, yang terdiri dari MPR, MK dan Ahli hukum dalam panitia khusus pembentuk Konstitusi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Afan Gaffar, 2004. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, cetakan keempat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Addul Rachmad, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing.
- Abdi Yuhana, 2013. *Sistim Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Bandung: Fokus Media.
- B.Hestu Cipto Handoyo, 2015. *Hukum Tata negara Indonesia edisi revisi*, Yogyakarta, Universitas Atma jaya Yogyakarta
- C.ST Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Firmansah Arifin, 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konserium Reformasi Hukum Nasional.
- HRT. Sri Soemantri, 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan pandangan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- I Gede Pantja Astawa, 2009, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perkembangan dan Konolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Setjen dan Kepanitraan MK RI
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Perkembangan dan Konolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Kacung Marijan, 2011. *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Runtuhnya Orde Baru*, Cetakan kedua, Jakarta, Kencana.
- Kaelan, 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Mariam Budiardjo, 2008. *Dasar- Dasar Ilmu Politik edisi revisi*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan kelima, Jakarta; Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI,
- Moh. Mahfud MD, 2014 *Politik Hukum di Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Rajawali Pers
- Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, 2011. *Ilmu Negara*, cetakan ketiga, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda, 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, edisi revisi, Kota Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ni'matul Huda, 2011. *Ilmu Negara*, cetakan ketiga, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda, 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan keenam, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nico, 2012. *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Jakarta Selatan: Pustaka Yustisia.
- Novendri M. Nggilu, , 2015. *Hukum dan Teori Konstitusi, Paham Konstitusi Yang Partisipatif dan Populis*, Jogjakarta, UII Press Jogjakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Prenada Group.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2014. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, edisi revisi, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, edisis Revisi, Jakarta:Rajawali Pres
- Saldi Isra, 2010. *Pergesaran Fungsi Legislasi*, Kota Depok, PT Raja Grafindo Persada,

Soejono Dirjosisworo, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi perguruan tinggi, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Suratman dan Philips, 2003. *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke satu, Bandung: Cv.Afabeta.

Umar, 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*, cetakan ketiga, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen dinsmika perkembangan dan urgensi penataanya kembali pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada)

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

3. Jurnal Hukum

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Luse Lusmiat, *Hubungan DPD dan DPR dalam Fungsi Legislasi menurut sistim ketatnegeraan Indonesia*.

Novendri M. Nggilu, *Strategi Penguatan Lembaga DPD dalam Sistem Parlemen Indonesia*, Penelitian Kolaboratif Dosen dan mahasiswa Tahun 2016.

Ria Casmi Arsa, *Konstruksi Yuridis Politik Legislasi DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012*

Fathuddin, *Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Kontruksi ketatanegaraan Indonesia*

Septiawan Riki, *Peranan DP, makalah-peranan-dpd.html*

Mansur Marzuki, 2008. *Analisis Kontekstasi Kelembagaan DPD dan upaya mengefektifkan keberadaanya*, Jurnal Hukum No 1, Vol 15

Miki Pirmansyah, *Eksitensi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistim bikameral indonesia*, jurnal cita hukum indonesia, vol 1, No 1 juni, 2014 Alumnus Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

M. Solly Lubis, Suhaidi, Faisal Akbar Nasution, *Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/PPU-X/2012)*,

4. Internet

<http://www.dpd.go.id/artikel-853-ruu-inisiatif-dpd-ri--produk-komite-i-tahun-2009-sd-2014>, di akses tanggal, 22 April-2017, Pukul 21.00 Wita

<http://www.dpd.go.id/kategori/pengawasan>, Di akses pada tanggal 9 Mei 2017, Pukul 23.00

<http://ejournal.unpak.ac.id/download.php?file=mahasiswa&id=515&name=Luse%20Lusmiaty%20010108094.pdf>, , di akses Tanggal 4-Maret-2017, Pukul 17.00

<http://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/viewFile/74/1827>, di akses tanggal 28-Februari-2017, Pukul 16.30 Wita.

<https://fathudin85.wordpress.com/2012/10/07/dewan-perwakilan-daerah-dpd-dalam-konstruksiketatanegaraan-indonesia>. .Di akses tanggal 17 November 2016. Pukul 21.00. WITA.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=342830&val=7177&>, 7-Maret -2017, Pukul,15.00 Wita.

<http://rikiseptiawan1809.blogspot.co.id/2012/05/makalah-peranan-dpd.html>, .Di akses tanggal 17 November 2016. Pukul 21.00. WITA.

Lampiran 1: Hasil Pengawasan DPD terhadap pelaksanaan Undang-undang

No	Pelaksanaan Pengawasan DPD RI
1	Keputusan DPD RI Nomor 34/DPD RI/II/2013-2014 Tentang Kesehatan berkenan dengan kesehatan ibu dan anak
2	Keputusan DPD RI Nomor 33/DPD RI/II/2013-2014 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berkenan dengan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H/2013 M
3	Keputusan DPD RI Nomor 25/DPD RI/II/2013-2014 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian khususnya mengenai pengangkatan tenaga Honorer menjadi calon Pegawai Negeri Sipil
4	Keputusan DPD RI Nomor 21/DPD RI/I/2013-2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
5	Keputusan DPD RI Nomor 19/DPD RI/I/2013-2014 Tentang Penataan Ruang
6	Keputusan DPD RI Nomor 14/DPD RI/I/2013-2014 Tentang sistem Jaminan sosial nasional
7	Keputusan DPD RI Nomor 13/DPD RI/I/2013-2014 Tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri
8	Keputusan DPD RI Nomor 77/DPD RI/IV/2012-2013 Tentang Hasil pengawasan DPD RI atas Penindakan lanjutan rekomendasi BPK Tahun 2012-2013
9	Keputusan DPD RI Nomor 76/DPD RI/IV/2012-2013 Tentang Hasil

	Pengawasan DPD RI atas penyelesaian kasus tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD dan dana oprasional pimpinan DPRD periode tahun 2004-2009
10	Keputusan DPD RI Nomor 75/DPD RI/IV/2012-2013 Tentang hasil pengawasan DPD RI atas penyimpangan dalam perijinan dan pengelolaan usaha pertambangan
11	Keputusan DPD RI Nomor 72/DPD RI/IV/2012-2013 Tentang hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang bidang perpajakan
12	Keputusan DPD RI Nomor 71/DPD RI/IV/2012-2013 Tentang Perkeretaapian
13	Keputusan DPD RI Nomor 69/DPD RI/IV/2012-2013 Tentang Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa
14	Keputusan DPD RI Nomor 66/DPD RI/IV/2012-2013 Tentang Perlindungan Anak
15	Keputusan DPD RI Nomor 65/ DPD RI/2012-2013 Tentang sistem Pendidikan Nasional berkenan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun ajaran 2012-2013
16	Keputusan DPD RI Nomor 63/DPD RI/IV/2012-2013 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
17	Keputusan DPD RI Nomor 59/DPD RI/III/2012-2013 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus
18	Keputusan DPD RI Nomor 58/DPD RI/III/2012-2013 Tentang Pengelolaan Sampah

19	Keputusan DPD RI Nomor 57/DPD RI/III/2012-2013 Tentang Panas Bumi
20	Keputusan DPD RI Nomor 53/DPD RI/III/2012-2013 Tentang Pemerintah Daerah
21	Keputusan DPD RI Nomor 52/DPD RI/III/2012-2013 Tentang Pemerintahan Daerah
22	Keputusan DPD RI Nomor 51/DPD RI/III/2012-2013 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
24	Keputusan DPD RI Nomor 50/DPD RI/III/2012-2013 Tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha mikro, kecil dan menengah
25	Keputusan DPD RI Nomor 48/DPD RI/III/2012-2013 Tentang sistem Pendidikan Nasional berkenaan dengan kebijakan kurikulum 2013
26	Keputusan DPD RI Nomor 46/DPD RI/III/2012-2013 Tentang Perumahan dan kawasan pemukiman
27	Keputusan DPD RI Nomor 71/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Badan Penyelenggaraan atas jaminan sosial
28	Keputusan DPD RI Nomor 70/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Perlindungan cagar budaya
29	Keputusan DPD RI Nomor 69/DPD RI/IV 2013-2014 Tentang hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi khusus

30	Keputusan DPD RI Nomor 68/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan
31	Keputusan DPD RI Nomor 58/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan tas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
32	Keputusan DPD RI Nomor 57/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
33	Keputusan DPD RI Nomor 42/DPD RI/III/2013-2014 Tentang hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro, dan menengah
34	Keputusan DPD RI Nomor 34/DPD RI/II/2013-2014 Tentang hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berkenanan dengan Kesehatan ibu dan anak
35	Keputusan DPD RI Nomor 33/DPD RI/III/2013-2014 Tentang hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji berkenan dengan penyelenggaraan ibadah haji 1434 H/2013 M
36	Keputusan DPR RI Nomor 25/DPD RI/II/2013-2014 tentang hasil

	<p>pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian khususnya mengenai Tenaga Honorer menjadi CPNS</p>
37	<p>Keputusan DPR RI Nomor 21/DPD RI/I/2013-2014 Tentang hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang APBN tahun 2013</p>
38	<p>Keputusan DPD RI Nomor 19/DPD RI/I/2013-2014 Tentang hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.</p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae



Nama : **Donal Taliki**

Tempat dan Tanggal Lahir : Bilato, 27 April 1995

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nama Orang Tua

Ayah : Olis Taliki

Ibu : Hasni Hajarati

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Email/ No. Hp : donal.taliki@outlook.com/ 082393602291

Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Desa Girisa,

Kec. Paguyaman. Kab. Boalemo,
Kab.Boalemo, Prov.Gorontalo

Pendidikan

No	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Pendidikan
1	2001	2007	SD Negeri 1 Bilato
2	2007	2010	SMP Negeri 9 Paguyaman
4	2010	2013	SMA Negeri 1 Paguyaman
5	2013	2017	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Pengalaman Organisasi

- 1) Anggota Forum Debat Hukum dan Konstitusi Merah Maron, Periode 2013
- 2) Ketua Bidang Hukum dan HAM, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial UNG, Periode, 2014
- 3) Ketua Departemen Kajian, Strategi Dan PAHAM Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UNG, Periode 2015
- 4) Pengurus Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia, Periode 2015-2016
- 5) Mentri Pemberdayaan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa UNG, Periode, 2016
- 6) Mentri Advokasi, Hukum Dan HAM, Badan Eksekutif Mahasiswa UNG, Periode 2016

Kegiatan yang pernah diikuti

- 1) Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru), Tahun 2013, Universitas Negeri Gorontalo
- 2) Peserta MASIMPAR Masa Integritas Mahasiswa Paguyaman Raya), Tahun 2013, Desa Boidu, Kec. Tapa, Kab. Bone Bolango
- 3) Peserta Sofskiil MOMB Tahun 2013, Universitas Negeri Gorontalo
- 4) Peserta MOMB Fakultas Ilmu Sosial, Tahun 2013, Universitas Negeri Gorontalo
- 5) Peserta Pelatihan Komputer dan Internet Pusat teknologi Informasi dan Komunikas, Tahun 2013, Universitas Negeri Gorontalo
- 6) Peserta Debat “Forum Debat Hukum dan Konstitusi Merah Maron”, Ilmu Hukum, Tahun 2013, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
- 7) Peserta LKBH PGRI Provinsi Gorontalo “Pemberdayaan masyarakat dibidang Hukum”, Tahun 2014, FH Universitas Negeri Gorontalo
- 8) Peserta Seminar Nasional “ Tenunan Kebangsaan dalam bingkai pendidikan Konstitusi dan budaya Demokrasi Untuk meweujudkan Integritas Bangsa” Tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar
- 9) Peserta Debat Konstitusi “Gebyar Konstitusi Piala Laica Marzuki” Tahun 2015, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar
- 10) Peserta Seminar Nasioanl, “Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan” Tahun 2014, Universitas Negeri Gorontalo.

- 11) Presidium Sidang Musyawarah Nasional “Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Se-Indonesia” Tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
- 12) Peserta Seminar Nasional “Penguatan Kompetensi Hakim dalam Komisi Yudisial” Tahun 2015, Komisi Yudisial-RI kerjasama Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UNG.
- 13) Peserta Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tingkat Regional Timur “Piala Mahkamah Konstitusi” Tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
- 14) Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan), Tahun 2015, Pengadilan Militer Manado.
- 15) Peserta PTUN (Praktek Tata Usaha Negara), Tahun 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara, Manado.
- 16) Moderator Dialog Interaktif “Paradigma Mahasiswa terkait sistem keuangan UNG”, Tahun 2016 Universitas Negeri Gorontalo.
- 17) Peserta “KKS Pengabdian dan KKN-RM (Kuliah Kerja Nyata-Revolusi Mental), Universitas Negeri Gorontalo” Tahun 2016, Desa Huyula, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo
- 18) Peserta Lomba Esay “Memperingati Hari Kartini” Tahun 2016, Badan Eksekutif Mahasiswa UNG.
- 19) Delegasi Terbaik Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa-Tingkat Menengah, Tahun 2015, Kemetrrian Riset, Tekonologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Hotel Megazanur, Gorontalo

- 20) Ketua Panitia Diskusi Kemahasiswa Se-Prov. Gorontalo “ Peran Mahasiswa Dalam menghadapi Tahun Politik” Tahun 2016, Badan Eksekutif Mahasiswa UNG.
- 21) Peserta TO (Training Organisasi), “ Berkrakter dan Berprestasi”, Tahun, 2016, Oleh UNG, Universitas Muhamadiyah makasar
- 22) Jendral Lapangan MOMB (Masa Orientasi mahasiswa Baru) “ Regenerasi jiwa Intelektual dalam pengembangan karakter melalui masa orientasi mahasiswa baru “ Tahun 2016, Universitas Negeri Gorontalo
- 23) Tamu Khusus Pembicara dalam Debat Kandidat Pemilihan Presma dan Wapresma BEM Politeknik Gorontalo, “Satu Suara Untuk Satu Perubahan” Tahun 2016, Politeknik Gorontalo
- 24) Peserta Studi Banding “Perbandingan Sistem Pemilihan Presma dan Wapresma Melalui Sistem E-Vot Universitas Negeri Gorontalo dengan Universitas Malang, dan Universitas Brwijaya” Tahun 2017, Univ.Malang dan Univ.Brawijaya
- 25) Peserta Seminar Nasional “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penghapusan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengangkatan hakim pada tingkat pertama” Tahun 2017 Fakultas Hukum UNG